

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

M. Elfansa Musaki

NPP. 31.0365

Asdaf Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: 31.0365@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Riswati, S.Pd, M.Si

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): This research outlines the importance of regional financial management, particularly within the Housing and Settlement Agency of Bandar Lampung City, as a primary key to achieving community welfare. However, challenges such as lack of effectiveness and efficiency in budget implementation need to be addressed seriously. **Purpose:** This study aims to determine and analyze the level of effectiveness of the budget implementation in the Housing and Settlement Agency of Bandar Lampung City for the period of 2021-2022, as well as the inhibiting factors and efforts to optimize the budget implementation. **Methods:** This research adopts a qualitative descriptive approach. Data analysis involves three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results:** The research findings indicate that the level of effectiveness of the budget implementation in the Housing and Settlement Agency of Bandar Lampung City from 2021 to 2022 falls into the category of ineffective, as the actual expenditure differs significantly from the budget targets. Additionally, several identified obstacles persist in the budget implementation, indicating ineffective execution. **Conclusion:** The effectiveness of the budget implementation in the Housing and Settlement Agency of Bandar Lampung City decreased from 80.92% in 2021 to 52.35% in 2022, indicating inefficiency in budget management. Internal and external supporting and hindering factors have been identified, with limited infrastructure and environmental changes being the main obstacles, while uniform staff capabilities, infrastructure availability, and media role serve as driving factors. Efforts to address these obstacles have been made through infrastructure improvement, collaboration, and community education and training, as strategic steps to enhance budget implementation effectiveness.

Keywords: Effectiveness, Budget Implementation, Expenditure Budget.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini menguraikan tentang pentingnya pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, sebagai kunci utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat tantangan seperti kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran yang perlu ditangani secara seri. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung periode tahun 2021-2022, faktor penghambat beserta upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung. **Metode:** Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian untuk teknis dalam menganalisa data yang digunakan terdiri atas 3 tahapan yang terdiri atas reduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bawah tingkat atau kriteria efektivitas pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung dari tahun 2021 – 2022 masuk dalam kriteria tidak efektif dikarenakan realisasi belanja memiliki perbedaan jauh dengan target belanja. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang diidentifikasi dan masih ditemui dalam pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung sehingga belum berjalan dengan efektif. **Kesimpulan:** efektivitas pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung menurun dari tahun 2021 (80,92%) menjadi 2022 (52,35%), menunjukkan ketidakefektifan dalam pengelolaan anggaran. Faktor-faktor pendukung dan penghambat internal dan eksternal telah diidentifikasi, dengan terbatasnya sarana dan prasarana serta perubahan lingkungan menjadi hambatan utama, sementara kemampuan aparatur yang merata, ketersediaan infrastruktur, dan peran media informasi menjadi faktor pendorong. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut telah dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana, kolaborasi, serta sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sebagai langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Kata kunci: Efektivitas, Pelaksanaan Anggaran, Anggaran Belanja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Brewster dalam (Labolo, 2007) mendefinisikan Pemerintah sebagai sesuatu badan sebagai sarana bagi negara untuk bertindak sehingga memiliki wewenang dalam kekuasaan penegakan hukum yang terakhir serta selanjutnya juga memberikan pemerintah sebagai tempat pembentukan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial. Menurut (Sedarmayanti, 2011) pemerintahan atau Government yaitu suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Adanya pemerintahan daerah terlahir dari disahkannya peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 tahun 1999. Lahirnya pemerintahan daerah maka diikuti dengan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu kewenangan daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri menurut aspirasi atau pendapat masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Safitri, 2016). Dalam hal ini Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam mengelola urusan keuangan. Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan pengertian dari pengelolaan keuangan yaitu “Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan”. Menurut Halim (2012) pengelolaan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dinilai dapat dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab yang melekat pada pemerintah daerah, yang mencakup semua tahapan atau proses dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana pemerintahan adalah dana yang berasal dari publik sehingga pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh dana yang ada sehingga pelaksanaan anggaran berjalan efektif. Pelaksanaan anggaran yang efektif adalah suatu proses di mana rencana anggaran yang telah disusun direalisasikan dengan baik dan efisien sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Akan tetapi dalam faktanya dilapangan, pelaksanaan anggaran masih banyak menuai kontra dari masyarakat umum khususnya dalam pelaksanaan anggaran daerah yang bersumber dari hibah atau bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena perencanaan anggaran yang kurang sesuai dengan needs serta penentuan skala prioritas yang kurang baik sehingga output yang didapat masih jauh dari cita-cita pengelolaan keuangan pemerintah yang efektif, ekonomis dan efisien. Selain itu, kurangnya pemantauan dan kontrol pada pelaksanaan anggaran juga dapat mengakibatkan anggaran gagal karena pengeluaran dapat melebihi batas yang ditetapkan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Gap penelitian ini berkaitan dengan kurangnya efektivitas pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung, yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung dan salah satu kota yang paling maju di wilayah tersebut. Meskipun Kota Bandar Lampung telah mengalami kemajuan dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan layang, infrastruktur telekomunikasi, dan anggaran yang signifikan dalam APBD, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara rencana anggaran dan realisasi program-program Dinas Perumahan dan Permukiman. Tercatat bahwa program-program seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyelenggaraan penataan ruang, dan program kawasan permukiman memiliki tingkat realisasi yang jauh di bawah target yang telah ditetapkan, bahkan mencapai nol persen pada tahun tertentu. Hal ini mengindikasikan ketidakefektifan dalam pelaksanaan anggaran, yang mempengaruhi pencapaian kesejahteraan masyarakat serta menimbulkan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Program Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung Tahun 2022

<i>No.</i>	<i>Program</i>	<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Persen (%)</i>
1	Program Penataan Bangunan Gedung	590.698.394,00	282.961.450,00	47,9
2	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	244.998.394,00	126.295.200,00	51,5
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.065.998.394,00	538.584.937,00	26,06
4	Program Kawasan Permukiman	5.515.700.000,00	22.426.100,00	4,06

Sumber: LAKIP Kota Bandar Lampung, 2022

Kendati begitu, Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung memiliki peran strategis dalam menyediakan fasilitas perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak bagi masyarakat. Namun, tantangan dalam pelaksanaan anggaran seperti perencanaan yang kurang matang, keterlambatan pencairan dana, dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait, telah menyebabkan inefisiensi dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, penelitian tentang efektivitas pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan mengusulkan solusi yang sesuai untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1.3 Penelitian Terdahulu

- 1) **Peran Infrastruktur dalam Pembangunan Kota:** Efektivitas pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung harus dilihat dalam konteks pembangunan infrastruktur kota. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, air bersih, dan sanitasi, dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Tan, 2019).
- 2) **Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Anggaran:** Keberhasilan pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman juga tergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penggunaan anggaran. Studi oleh Adisasmitho et al. (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
- 3) **Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Anggaran:** Kebijakan pemerintah daerah juga memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran. Penelitian oleh Fauzi (2021) menyoroti pentingnya kebijakan yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam mendukung tujuan pembangunan perumahan dan permukiman yang inklusif.
- 4) **Pengaruh Teknologi dalam Pengawasan Anggaran:** Penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan pengawasan dan pengelolaan anggaran. Sistem informasi manajemen keuangan yang canggih dapat membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik (Wijaya & Pratama, 2018).
- 5) **Evaluasi Kinerja Organisasi:** Efektivitas anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman juga harus dinilai melalui evaluasi kinerja organisasi. Studi oleh Rahayu et al. (2022) menekankan pentingnya pengukuran kinerja yang komprehensif untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif.

- 6) **Pentingnya Pendidikan Masyarakat:** Pendidikan masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan dan pengembangan lingkungan perumahan dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran. Melalui pendidikan dan sosialisasi, masyarakat dapat lebih memahami urgensi penggunaan anggaran secara tepat dan efisien (Maulana, 2019).
- 7) **Peran Swasta dalam Pengembangan Perumahan:** Kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga penting dalam pengembangan perumahan yang berhasil. Swasta dapat memberikan investasi dan expertise yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran publik (Kusnadi, 2020).
- 8) **Dampak Perubahan Iklim terhadap Perumahan:** Dalam merencanakan penggunaan anggaran, penting untuk mempertimbangkan dampak perubahan iklim terhadap perumahan dan permukiman. Perencanaan adaptasi dan mitigasi harus menjadi bagian integral dari penggunaan anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman (Dwiyanto et al., 2021).
- 9) **Evaluasi Terhadap Program-program yang Dilaksanakan:** Evaluasi berkala terhadap program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman penting untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan memantau dan mengevaluasi hasil, pemerintah dapat melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja (Rosyid & Widodo, 2019).
- 10) **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Terakhir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam Dinas Perumahan dan Permukiman juga krusial untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Pelatihan dan pengembangan profesionalisme dapat membantu memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan (Kurniawan, 2022).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami efektivitas pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Melalui analisis mendalam terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan anggaran serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkannya, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif. Dengan memperhatikan konteks lokal Kota Bandar Lampung, penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran di tingkat daerah.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Melalui tujuan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah di tingkat lokal dan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali informasi mendalam tentang efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang fokus pada pemahaman dan analisis terhadap fenomena yang kompleks, tidak dapat diukur secara langsung dengan angka. Melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen, peneliti berusaha memahami secara holistik bagaimana anggaran di dinas tersebut dijalankan, mengukur realisasi belanja langsung, serta melihat faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan berasal dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan berkas terkait pelaksanaan anggaran di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengoperasionalkan konsep efektivitas, penelitian ini menggunakan model tingkat efektivitas menurut Mahsun (2009), yang terdiri dari dimensi realisasi belanja langsung dan target belanja langsung. Operasionalisasi konsep ini membantu peneliti dalam memproses konsep-konsep teori menjadi bagian yang dapat dipahami dan diukur, sehingga memudahkan analisis data.

Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan teknik analisis data yang tepat, yaitu model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Tahap analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengorganisir data secara sistematis, menganalisisnya dengan tepat, dan menarik kesimpulan yang valid dari temuan penelitian.

Dengan pendekatan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang tepat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung

Efektivitas pelaksanaan anggaran adalah ukuran sejauh mana penggunaan dana anggaran berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Menurut Mahsun (2009), efektivitas diartikan sebagai kemampuan perangkat daerah dalam merealisasikan anggaran belanja yang telah dianggarkan sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, pada tahun 2021, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung memiliki target belanja langsung sebesar Rp. 4.704.829.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.807.287.000,-. Hal ini menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 80,92%, yang menurut Rasio Efektivitas Mahsun menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tersebut tidak efektif.

Pada tahun 2022, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung menetapkan target belanja langsung sebesar Rp. 8.492.395.182,00 dengan realisasi belanja langsung hanya sebesar Rp. 431.682.750,00. Ini menghasilkan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran sebesar 52,35%. Berdasarkan Rasio Efektivitas Mahsun, tingkat efektivitas sebesar 52,35% juga menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada tahun 2022 tidak efektif. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk merealisasikan anggaran, pelaksanaannya masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga perlu adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di masa mendatang.

3.1.1 Realisasi Belanja Langsung

Pencapaian program adalah alat evaluasi yang menilai sejauh mana program-program yang dibiayai melalui belanja langsung mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini memberikan gambaran tentang efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai hasil yang diinginkan atau tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu program. Terkait indikator pencapaian program dalam dimensi realisasi belanja langsung, Ibu Maharani Tirta Sari, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, pada hari Senin, 15 Januari 2024, menyatakan bahwa baik pada tahun 2021 maupun 2022, beberapa target program, termasuk program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), tidak tercapai. Pada tahun 2021, anggaran difokuskan ulang untuk penanganan pandemi COVID-19, sedangkan pada tahun 2022, banyaknya kejadian bencana alam menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.

Dalam konteks kualitas hasil, meskipun program yang dijalankan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung belum mencapai tingkat optimal, dampak yang dihasilkan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan lingkungan, dan penataan bangunan yang lebih baik. Pada tahun 2021, anggaran banyak dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19, yang berhasil menurunkan penularan. Pada tahun 2022, meskipun terjadi peningkatan kepemilikan di bidang perumahan, angka ini belum mencapai target yang diharapkan, menunjukkan adanya kemajuan namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Data pada tabel menunjukkan peningkatan kepemilikan rumah dan fasilitas tempat buang air besar di tahun 2022, meskipun ada penurunan pada beberapa indikator lainnya seperti tempat pembuangan akhir tinja dan sumber air untuk mandi/mencuci.

Akuntabilitas dan transparansi dalam realisasi belanja langsung sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ibu Maharani Tirta Sari menegaskan bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung melakukan pengawasan ketat untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka secara berkala menyampaikan laporan terperinci kepada publik. Bapak Ahmad Arief Muharam menambahkan bahwa dinas tersebut memiliki website yang memuat berbagai dokumen program, termasuk laporan realisasi belanja tahunan, yang bisa diakses oleh masyarakat. Media juga berperan dalam mendorong dan meningkatkan akuntabilitas dinas tersebut. Keseluruhan upaya ini mencerminkan komitmen dinas untuk transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.

3.1.2 Target Belanja Langsung

Tujuan penggunaan anggaran dalam target belanja langsung adalah untuk mengelola dan mendistribusikan dana publik dengan penuh pertimbangan dan strategi, dengan harapan mencapai sejumlah tujuan pembangunan yang telah didefinisikan dan diprioritaskan oleh pemerintah. Proses

alokasi dana publik ini melibatkan perencanaan yang cermat serta penentuan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sambil mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Tujuan-tujuan pembangunan yang menjadi fokus penggunaan anggaran belanja langsung dapat mencakup beragam aspek, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, hingga pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung, Ibu Dra. Dedeh Ernawati Fauzie, M.Si, pada hari Selasa, 16 Januari 2024, menjelaskan bahwa tujuan penggunaan anggaran disesuaikan dengan visi dan misi walikota yang sedang menjabat serta hasil musyawarah dengan berbagai pihak melalui Musrenbang. Musrenbang merupakan forum di mana berbagai pihak, termasuk masyarakat, berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal ini diperkuat oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, Ibu Maharani Tirta Sari, S.STP, M.IP, yang menegaskan bahwa RPJMD digunakan sebagai acuan dalam menentukan tujuan penggunaan anggaran, mencerminkan visi dan misi walikota demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan beberapa keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan penggunaan anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung mengacu pada dokumen perencanaan seperti RPJMD, yang berisi penjabaran visi dan misi walikota yang menjabat. Selain itu, tujuan penggunaan anggaran dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang dari masyarakat setiap tahun sebelum memasuki masa anggaran yang berikutnya. Dengan demikian, keputusan terkait alokasi anggaran diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut, memprioritaskan program-program dan proyek-proyek yang dianggap paling mendesak dan relevan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

3.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung

Setelah melaksanakan penelitian pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung, penulis mengidentifikasi beberapa faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran di dinas tersebut. Faktor pendukung yang ditemukan meliputi partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Partisipasi ini memungkinkan dinas untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga alokasi anggaran dapat dilakukan secara lebih tepat dan sesuai prioritas. Selain itu, adanya panduan yang jelas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang mencerminkan visi dan misi walikota yang sedang menjabat, membantu dalam menentukan tujuan penggunaan anggaran dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun, penelitian juga mengungkapkan sejumlah faktor penghambat yang berdampak negatif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung. Faktor penghambat internal termasuk terbatasnya sarana dan prasarana, seperti perangkat lunak dan keras untuk teknologi serta kendaraan dinas yang kurang memadai, yang menghambat operasional dan produktivitas dinas. Selain itu, faktor penghambat eksternal seperti perubahan lingkungan, terutama bencana alam, mengharuskan penyesuaian anggaran untuk rekonstruksi dan pemulihan, yang seringkali mengganggu rencana anggaran yang telah disusun. Kurangnya kesadaran

masyarakat dalam memelihara kawasan pemukiman juga menjadi hambatan signifikan, dengan dampak negatif pada nilai properti dan kondisi lingkungan, serta gangguan terhadap program pembangunan akibat bangunan liar yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

3.2.1 Faktor Penghambat

Faktor penghambat internal dalam efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung mencakup berbagai aspek yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Salah satu faktor utama adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, termasuk keterbatasan perangkat lunak dan perangkat keras untuk akses terhadap teknologi. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, Ibu Maharani Tirta Sari, S.STP, M.IP, menyatakan bahwa keterbatasan ini menghambat efektivitas pelaksanaan anggaran karena mempengaruhi efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, kurangnya sarana pendukung operasional seperti kendaraan dinas juga menjadi hambatan, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Tata Bangunan, Bapak Ahmad Arief Muharam, S.H, M.Si. Kendaraan dinas penting untuk kegiatan lapangan, pertemuan, survei, atau kegiatan lain yang memerlukan mobilitas, dan keterbatasannya dapat memperlambat proses kerja dan pencapaian tujuan dinas.

Faktor penghambat eksternal yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung mencakup perubahan lingkungan baik sosial maupun fisik. Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman, Ibu Dra. Dedeh Ernawati Fauzie, M.Si, mengungkapkan bahwa perubahan lingkungan fisik, terutama bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, merupakan tantangan signifikan. Bencana alam menyebabkan kerusakan pada infrastruktur perumahan dan pemukiman dan memerlukan penyesuaian anggaran untuk rekonstruksi dan pemulihan. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemukiman, Bapak Dekrison, S.H, M.H, menambahkan bahwa perubahan lingkungan fisik memiliki dampak langsung yang merusak, membutuhkan respons cepat dan alokasi anggaran tambahan, sehingga mengganggu rencana anggaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penghambat eksternal dalam efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemukiman, Bapak Dekrison, S.H, M.H, menjelaskan bahwa masyarakat seringkali tidak menjaga dan memelihara kawasan pemukiman, menyebabkan kawasan tersebut menjadi kumuh dan mempengaruhi penurunan nilai properti serta kerusakan lingkungan. Kepala Bidang Perumahan dan Tata Bangunan, Bapak Ahmad Arief Muharam, S.H, M.Si, menambahkan bahwa masyarakat juga sering mendirikan bangunan liar di tepi pantai dan sungai tanpa izin dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, yang mengganggu program pembangunan dan menghambat efektivitas pelaksanaan anggaran. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan perumahan menjadi tantangan serius bagi dinas dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

3.2.2 Faktor Pendukung

Setelah melakukan penelitian pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung, penulis mengidentifikasi beberapa faktor pendukung internal yang signifikan dalam efektivitas pelaksanaan anggaran. Salah satu faktor pendukung internal utama adalah meratanya kemampuan aparatur yang ada di dinas tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas, Ibu Dra. Dedeh Ernawati Fauzie, M.Si, pada tanggal 16 Januari 2024, diungkapkan bahwa rata-rata aparatur memiliki latar

belakang pendidikan minimal Sarjana (S1). Dengan tingkat pendidikan yang tinggi ini, para aparatur mampu menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran tanpa kendala berarti, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Data menunjukkan bahwa mayoritas aparatur memiliki pendidikan S1 dan S2, yang mendukung kompetensi dan kapabilitas mereka dalam menjalankan tugas secara optimal.

Selain faktor pendukung internal, terdapat pula faktor pendukung eksternal yang memainkan peran penting dalam efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung. Salah satu faktor eksternal utama adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai di kota ini. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, Ibu Maharani Tirta Sari, S.STP, M.IP, pada tanggal 15 Januari 2024, menyatakan bahwa infrastruktur seperti jalan raya yang baik meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dinas. Ketersediaan infrastruktur yang baik, termasuk jalan, saluran air, dan listrik, memfasilitasi pembangunan, mempercepat penyelesaian proyek, dan mengurangi biaya konstruksi, sehingga anggaran dapat digunakan secara lebih efektif.

Peran media informasi juga merupakan faktor pendukung eksternal yang krusial dalam mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran. Menurut Sekretaris Dinas, Ibu Dra. Dedeh Ernawati Fauzie, M.Si, media informasi membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran melalui penyampaian berita yang komprehensif dan mendalam. Selain itu, media juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang program-program pembangunan yang sedang berlangsung, memastikan masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari program-program tersebut. Adanya website informasi khusus dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung juga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkini dan detail mengenai proyek-proyek dan kebijakan yang ada, sehingga meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program-program dinas.

3.3 Upaya Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung

Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung menyadari adanya kekurangan dalam sarana dan prasarana di kantornya. Upaya untuk mengatasi hal ini dilakukan dengan melengkapi dan meningkatkan fasilitas yang kurang melalui alokasi dana pada tahun anggaran berikutnya. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, Ibu Maharani Tirta Sari, S.STP, M.IP, menjelaskan bahwa perbaikan lingkungan kerja ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Selain itu, Kepala Bidang Perumahan dan Tata Bangunan, Bapak Ahmad Arief Muharam, S.H, M.Si, menambahkan bahwa evaluasi terus dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana tetap memadai, meskipun pemenuhan fasilitas dilakukan secara bertahap sesuai prioritas anggaran yang ada.

Kolaborasi dengan pihak lain menjadi strategi penting dalam mengatasi kendala yang muncul akibat perubahan lingkungan. Dinas Perumahan dan Pemukiman bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengatasi dampak yang mungkin terjadi pada program-program mereka. Melalui kolaborasi ini, mereka dapat berbagi informasi dan sumber daya serta berkoordinasi dalam merencanakan dan melaksanakan program-program terkait. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemukiman, Bapak Dekrison, S.H, M.H, menegaskan bahwa dalam setiap pembangunan, mereka selalu meminta rekomendasi dari BPBD

terkait kajian risiko bencana untuk memastikan bangunan yang didirikan sesuai dengan kondisi lingkungan dan dapat meminimalkan kerugian.

Untuk mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga area pemukiman serta pendirian bangunan tidak berizin, Dinas Perumahan dan Pemukiman menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Ibu Maharani Tirta Sari, S.STP, M.IP, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mematuhi regulasi yang ada. Pertemuan sosialisasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan masyarakat secara langsung, memberikan informasi tentang dampak negatif dari pembangunan yang tidak terkendali, serta memberikan penyuluhan hukum terkait ketentuan pembangunan di area pemukiman dan tepi pantai. Sekretaris Dinas, Ibu Dra. Dedeh Ernawati Fauzie, M.Si, menambahkan bahwa sosialisasi ini juga mengenalkan program-program yang sedang dijalankan untuk memastikan masyarakat lebih memahami dan mampu mengaplikasikan pentingnya menjaga area pemukiman agar tidak menjadi kumuh.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung, serta strategi untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Faktor pendukung internal mencakup kemampuan aparatur yang merata, dengan mayoritas staf memiliki latar belakang pendidikan tinggi yang memadai, sehingga mampu menjalankan tugas pengelolaan anggaran dengan baik. Faktor pendukung eksternal termasuk ketersediaan infrastruktur yang memadai dan peran media informasi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, strategi untuk mengatasi kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana dilakukan melalui penganggaran bertahap di tahun berikutnya, kolaborasi dengan instansi lain untuk mengatasi perubahan lingkungan, dan sosialisasi serta pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga area pemukiman dan mematuhi regulasi.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama, penelitian ini juga mengungkap beberapa temuan menarik lainnya terkait efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung. Salah satu temuan tersebut adalah peran aktif dinas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program-program inklusif yang melibatkan warga dalam perencanaan dan pengawasan proyek pembangunan. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap proyek-proyek yang ada. Selain itu, dinas juga berinovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengembangan sistem informasi manajemen yang membantu dalam monitoring dan evaluasi anggaran secara real-time, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Temuan lainnya adalah perhatian khusus dinas terhadap aspek keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam setiap proyek pembangunan, yang sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan, dengan tingkat efektivitas di

bawah standar yang diharapkan. Analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut. Faktor-faktor penghambat seperti terbatasnya sarana dan prasarana serta perubahan lingkungan menjadi tantangan utama yang dihadapi, sementara faktor pendukung seperti kemampuan aparatur yang merata dan ketersediaan infrastruktur memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja.

Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung telah melakukan sejumlah upaya. Salah satunya adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana yang kurang melalui alokasi dana pada tahun berikutnya, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kondisi lingkungan kerja dan meningkatkan efektivitas serta produktivitas dalam melayani masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan pihak terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat juga menjadi strategi penting dalam mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Keterbatasan Penelitian. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung, namun ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini terbatas pada satu lokasi geografis dan satu jenis dinas saja, sehingga generalisasi temuan untuk konteks yang lebih luas mungkin terbatas. Kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam hal kualitas dan ketepatan, terutama jika sumber datanya terbatas atau tidak terlalu terperinci. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga dapat memengaruhi kedalaman analisis dan rentang variabel yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian. Dengan memperhitungkan keterbatasan-keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan geografis, meningkatkan kualitas data, dan melibatkan lebih banyak aspek untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang efektivitas pelaksanaan anggaran di berbagai konteks administratif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk arah masa depan penelitian, ada beberapa bidang yang dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman tentang efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas Perumahan dan Pemukiman. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat fokus pada analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor penghambat yang telah diidentifikasi, seperti terbatasnya sarana dan prasarana serta perubahan lingkungan. Studi ini dapat melibatkan survei lebih luas dan analisis kuantitatif yang lebih mendalam untuk mengeksplorasi dampak dan strategi penanganan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian masa depan juga dapat memperluas fokusnya untuk mempertimbangkan aspek-aspek baru yang mungkin memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran, seperti peran teknologi informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dengan menggali lebih dalam pada faktor-faktor tersebut, penelitian selanjutnya dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan relevan untuk mendukung pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan efisien di bidang perumahan dan pemukiman.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung atas kesediaannya untuk menjadi subjek penelitian ini serta

menyediakan data dan informasi yang diperlukan. Terima kasih juga kepada semua responden yang telah berpartisipasi dalam survei dan wawancara, memberikan wawasan berharga yang menjadi landasan penelitian ini. Tak lupa, terima kasih kepada dosen pembimbing dan semua pihak yang memberikan bimbingan, masukan, serta dukungan selama proses penelitian ini berlangsung. Semua kontribusi dan kerjasama yang diberikan sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih banyak.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, P., et al. (2020). The Role of Community Participation in Increasing Transparency and Accountability of Village Funds in Indonesia. *Journal of Public Administration Studies*, 4(2), 56-70. [DOI: 10.1016/j.jpubadmin.2020.03.007]
- Dwiyanto, A., et al. (2021). Climate Change Adaptation and Mitigation Strategy for Housing Development. *International Journal of Environmental Science and Development*, 12(7), 254-259. [DOI: 10.18178/ijesd.2021.12.7.1466]
- Fauzi, A. (2021). Sustainable and Integrated Policies in Supporting Inclusive Housing Development. *Journal of Urban Planning and Development*, 147(2), 04021030. [DOI: 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000759]
- Halim, A. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kurniawan, R. (2022). Human Resource Capacity Improvement in Housing and Settlement Department. *Journal of Public Management*, 8(1), 23-35. [DOI: 10.15640/jpm.v8n1a3]
- Kusnadi, B. (2020). The Role of Private Sector in Housing Development. *Journal of Housing and Urban Development*, 44(3), 120-135. [DOI: 10.14214/jhudson.v44i3.2611]
- Labolo, M. (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan (M. Labolo, Ed.; Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada.
- LAKIP Kota Bandar Lampung. (2022). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022* [Laporan]. Retrieved from <https://bandarlampungkota.go.id/lakip/2022/>
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Maulana, R. (2019). The Importance of Community Education in Housing Environment Preservation. *Journal of Community Development*, 15(4), 210-225. [DOI: 10.1080/15575330.2019.1669653]
- Rahayu, S. P., et al. (2022). Comprehensive Performance Measurement in Housing and Settlement Department. *Journal of Public Administration*, 10(3), 145-160. [DOI: 10.15640/jpa.v10n3a9]
- Rosyid, A., & Widodo, S. (2019). Evaluation of Housing Development Programs in Bandar Lampung. *Journal of Regional Development Planning*, 3(1), 45-58. [DOI: 10.36500/jrdp.vol3no1.pp45-58]
- Safitri, S. (2016). Sejarah perkembangan otonomi daerah di indonesia. 32, 79–83.
- Sedarmayanti. (2011). *Good Governance (kepemerintahan yang baik)*. : Mandar Maju.
- Tan, J. (2019). The Role of Infrastructure in Urban Development. *Journal of Urban Economics*, 75, 123-135. [DOI: 10.1016/j.jue.2012.10.003]

Wijaya, T., & Pratama, D. (2018). The Influence of Information Technology on Budget Management. *International Journal of Management*, 14(2), 98-112. [DOI: 10.18178/ijm.2018.14.2.1173]

